

KSAD Jenderal Dudung Pimpin Sertijab Sejumlah Pejabat TNI AD

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman memimpin upacara serah-terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat TNI AD. Pejabat Danpuspom AD hingga Dankodiklatad diganti.

Proses sertijab dilakukan di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Senin (30/1). Sertijab tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/48/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Salah satu yang diganti ialah Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) Letjen TNI Chandra W Sukotjo. Chandra diganti dalam rangka masa purnabakti. Dia akan menduduki jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara jabatan Danpuspomad belum ada diisi oleh pejabat baru.

Koordinator Staf Ahli KSAD (Koorstahli KSAD) juga mengalami pergantian dari Letjen Afini Boer kepada Letjen Ignatius Yogo Triyono. Sementara Komandan Komando Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklatad) kini diisi Letjen Arif Rahman.

Selanjutnya, jabatan Ko-

mandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Danpusseinf) yang sebelumnya dijabat Letjen TNI Arif Rahman kini dijabat oleh Mayjen TNI Anton Nugroho. Jabatan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) juga berganti dari Mayjen Anton Nugroho kepada Brigjen TNI Ketut Duara.

Jabatan Direktur Keuangan TNI Angkatan Darat (Dirkuad) dari Brigjen TNI Garanta Singkali diserahkan kepada Kolonel Cku Ari Yulistiyono. Selanjutnya, jabatan Kepala Dinas Psikologi Angkatan Darat (Kadispsiad) dari Brigjen TNI Tagar Pujasembada kini dijabat Kolonel Inf Heny Setyono.

Selain Danpuspomad Chandra, dua pati lain yang memasuki masa purnabakti ialah Letjen TNI Afini Boer dan Brigjen TNI Garanta Singkali. Dalam sambutannya, Dudung berpesan para pejabat baru harus selalu bertanggung jawab dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

“Saya berpesan bahwa jabatan yang kita emban bukan hanya status semata, melainkan amanah yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia, Negara, dan Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Dudung dalam keterangannya. ● han

Norma Gandeng Hotman Paris Laporkan Ibumya dan Mantan Suami terkait Perzinahan

JAKARTA (IM) - Kasus perselingkuhan ibu mertua dengan dan mantan menantunya memasuki babak baru. Putri kandungnya, Norma Risma akhirnya melaporkan mantan suaminya, Rozy Zay Hakiki dan ibu kandungnyai, Rihanah Anah ke Polisi.

Norma Risa pun menggendeng tim dari Hotman Paris 911 untuk melaporkan keduanya pada Minggu (29/1). Mereka datang sekitar pukul 14.00 WIB, hingga Senin dini hari, 30 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB.

“Kita dari tim 911 Hotman Paris Official, di sini kita mendampingi saudara Norma untuk membuat laporan terkait dugaan perzinahan yang dilakukan saudara R dan saudara R, “ ujar salah satu kuasa hukumnya, Zahra Amelia, di Mapolda Banten, Senin (30/1).

Zahra juga enggan berkomentar lebih banyak mengenai penanganan kasus tersebut. Karena keterangan lengkap akan diberikan langsung oleh Hotman Paris.

“Terkait kenapa saudara Norma mau melaporkan, kita belum bisa jawab sekarang, nanti akan dijelaskan oleh Bang Hotman lang-

sung,” katanya.

Laporan Polisi (LP) telah diterima oleh Ditreskrim Polda Banten dengan nomor LP/B/19/1/2023/SPKT II.DITRESKRIMUM/POLDA BANTEN, dengan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.

Kisa viral ini awalnya dibagikan oleh Risma di media sosial TikTok, bahwa ibunya pernah berhubungan badan dengan mantan suaminya. Saat itu, dia sempat tidak percaya bahwa suaminya memiliki hubungan gelap dengan ibunya sendiri.

Risma pun menceritakan kenal dengan mantan suaminya itu saat masih SMA di akhir tahun 2017. Dari sana pacaran dengannya sampai pada April 2021 nikah.

Sebelum nikah tepatnya di tahun 2020, Risma juga pernah memergoki chat mesum antara mantan suaminya dan ibunya. Dia pun pernah juga menunjukkan buktinya ke ayahnya.

Mereka sempat membahas masalah ini bersama hingga sang mantan suaminya itu bersumpah di kaki ayahnya dan mengatakan bahwa dia khilaf dan masih mencintai Risma. ● han

Pegawai Kemenkumham Ikrarkan Netralitas dalam Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Jajaran pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan komitmen netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

Komitmen ini dinyatakan dalam ikrar dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Reviyanto, Senin (30/1).

Andap menjelaskan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur agar ASN bebas dari pengaruh dan intervensi partai politik.

“ASN tidak boleh terpengaruh partai politik karena ASN merupakan Abdi Negara yang melaksanakan pelayanan publik secara profesional dan bukan alat kekuasaan,”

kata Andap di kantor Kemenkumham.

Netralitas ASN Kemenkumham meliputi penggunaan media sosial secara bijak. Sesuai ikrar yang diucapkan seluruh pegawai Setjen Kemenkumham, para pegawai tidak akan menggunakan media sosial untuk kepentingan pasangan calon tertentu serta tidak menyebarkan berita bohong.

“Hati-hati menggunakan media sosial dalam genggam kita. Perhatikan baik-baik pesan yang kita terima dan teruskan, pula foto dan video yang kita unggah. Jangan sampai kontennya berisi ujaran kebencian, hoaks, atau kepentingan pasangan calon tertentu,” katanya.

Meskipun demikian, ASN masih tetap memiliki hak politik untuk memilih kontestan politik di dalam bilik suara. Di saat inilah ASN dapat mengekspresikan pilihan politiknya. “Hanya di bilik suara ASN dapat menyalurkan pilihannya. Di luar bilik suara, ASN tidak perlu menunjukkan ekspresi politiknya,” ujar Andap.

Selain ikrar netralitas Pemilu, jajaran Setjen Kemenkumham juga menyatakan komitmen bersama untuk bersih dari praktik KKN melalui pembangunan Zona Integritas (ZI). ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PKB GELAR SARASEHAN NASIONAL SATU ABAD NU

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) berbincang dengan Budayawan Sujiwo Tejo (kanan) saat menghadiri kegiatan ‘Sarasehan Nasional Satu Abad NU’ di Jakarta, Senin (30/1). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengadakan sarasehan nasional peringatan satu abad atau 100 tahun Nahdlatul Ulama (NU) dengan tema “Satu Abad Kebangkitan Ulama Menuju Masa Depan Kebangkitan Bangsa”.

Terdakwa Kasus Indosurya Manfaatkan Celah Hukum untuk Lakukan Penipuan

Para korban penipuan Indosurya tak pernah merasa menjadi anggota koperasi. Mereka merupakan korban penipuan investasi bodong bos Indosurya.

JAKARTA (IM) - Dua terdakwa kasus Indosurya, yakni Henry Surya dan June Indria, telah divonis bebas oleh Majelis Hakim karena perbuatannya dinilai sebagai tindakan perdata, bukan pidana.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai tidak ada perbuatan perdata yang dilakukan oleh para terdakwa kasus investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Ketut Sumedana mengatakan, para terdakwa justru memanfaatkan celah hukum untuk melakukan penipuan.

“Tidak ada perbuatan perdata sama sekali yang dilakukan oleh Henry Surya dan June Indria, dan Suwito Ayub,” ucap Ketut.

Senin (30/1).

Para terdakwa melakukan penipuan dengan kedok koperasi, sehingga membuat seluruh kegiatannya seolah-olah menjadi legal. Padahal, para korban tidak pernah merasa menjadi anggota koperasi tetapi lebih malah menjadi korban penipuan investasi bodong.

“Sehingga, penerapan hukum perdata dalam perkara tersebut jauh dari rasa keadilan dan sangat melukai masyarakat yang menjadi korban investasi bodong yang dikendalikan oleh Henry Surya, June Indria, dan Suwito Ayub,”

Atas dasar itu, Kejagung pun mengajukan upaya hukum kasasi terhadap vo-

nis para terdakwa. Ketut menjelaskan, KSP Indosurya telah memiliki 23.000 nasabah dengan mengumpulkan dana nasabah sebanyak Rp 106 triliun. Berdasarkan hasil audit nasabah, ada lebih dari 6.000 nasabah yang tidak terbayarkan dengan jumlah kerugiannya sebesar kurang lebih Rp 16 triliun.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan, KSP Indosurya tidak memiliki legal standing sebagai koperasi. Pertama, karena KSP Indosurya tidak pernah dilakukan rapat anggota yang memiliki kewenangan tertinggi minimal satu tahun sekali sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Kedua, anggota yang direkrut tidak memiliki kartu keanggotaan dan tidak pernah dilibatkan dalam mengambil keputusan penting seperti pembagian dividen atau Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya dan perubahan nama koperasi menjadi KOSPIN

Indosurya Cipta.

Ketiga, produk yang dijual tidak masuk akal, seperti simpanan berjangka yang nilai simpanannya mulai Rp 50 juta sampai jumlah tidak terbatas dengan iming-iming bunga 8,5 persen sampai 11,5 persen yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

“Perbuatan Henry Surya, June Indria, dan Suwito Ayub dengan dalih membuat koperasi simpan pinjam, semata-mata untuk menipu masyarakat yang membuat pengumpulan uang KSP Indosurya seolah-olah untuk kepentingan dan kesejahteraan para anggota,” ucapnya.

“Padahal perbuatan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya pengawasan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menghindari proses perzinahan penghimpunan dana masyarakat melalui Bank Indonesia,” ujar Ketut. ● han

Jaksa Sebut Cerita Pelecehan Putri Chandrawati seperti Cerita Bersambung yang Berubah-ubah

JAKARTA (IM) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan repliknya dalam sidang dugaan kasus pembunuhan Brigadir J, dengan terdakwa Putri Candrawathi di Pengadilan Negeri (PM) Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (30/1).

Dalam replik atau tanggapan atas pledoi (pembelaan) Putri yandibacakan pada sidang sebelumnya, Jaksa menyebutkan, cerita pemerkosan Putri Candrawathi seperti cerita bersambung yang berubah-ubah.

Jaksa mengatakan, berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan menunjukkan Putri merupakan salah satu pelaku pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Padahal, dalam pleidoinya, Putri Candrawathi mengaku tak mengerti mengapa sampai dia dijadikan sebagai pelaku pembunuhan.

“Terdakwa Putri Candrawathi tak memahami atau pura-pura tak memahami apa itu pembunuhan berencana, tapi terdakwa Putri melakukan karakter yang dipersyaratkan dengan pem-

bunuhan berencana, yaitu menyampaikan cerita terhadap saudara Ferdy Sambo berupa cerita jika terdakwa Putri Candrawathi dilecehkan yang kemudian berubah menjadi cerita pemerkosan,” ujar Sugeng Hariyadi di persidangan, Senin (30/1).

Menurut Jaksa, dalam persidangan terungkap, Putri Candrawathi awalnya mengaku dilecehkan Brigadir J di rumah Duren Tiga. Namun, cerita pelecehan itu berubah dengan berpindah lokasi di rumah Magelang, yang mana di Magelang itu Putri mengaku diperkosa oleh Brigadir J.

“Sehingga perubahan cerita-cerita tersebut seperti cerita bersambung layaknya cerita yang penuh khayalan yang kental akan siasat jahat,” tutur Jaksa.

Meski begitu, tambah Jaksa, namanya kejahatan yang memiliki sifat tak ada yang sempurna dan pasti meninggalkan jejak, tak dapat disembunyikan. Sehingga peristiwa tersebut terbuka dengan terang benderang di hadapan persidangan, yang mana Putri merupakan salah

satu pelaku pembunuhan Brigadir J.

Tidak Relevan

Jaksa juga menyebut bahwa pengakuan Putri Candrawathi, mengalami depresi lantaran kekerasan seksual tidaklah relevan.

“Di dalam pleidoi tim penasihat hukum terdakwa menggunakan alat bukti keterangan ahli psikologi forensik yang menggambarkan terdakwa Putri Candrawathi sebagai orang yang mengalami depresi atau trauma kekerasan seksual adalah tidak relevan,” ujar Jaksa dalam replik.

Jaksa menyebut, alat bukti tersebut sebagai circumstant evidence atau alat bukti tidak langsung, baik dalam keterangan ahli psikologi forensik Reni Kusumawardani dan ahli Nathanael Johannes Sumampouw. Keduanya memberikan keterangan yang persidangan di bawah sumpah.

Hasil analisis psikologi forensik memiliki deviasi dan hasil psikologi forensik tak bisa 100 persen menjamin kebenaran sesuai fakta yang sebenarnya. ● han



FOTO: ANT

JELANG ASEAN TOURISM FORUM 2023

Pekerja menyelesaikan pembuatan stan di Jogja Expo Centre, Bantul, DI Yogyakarta, Senin (30/1). Berbagai persiapan teknis seperti konstruksi stan terus dilakukan di sejumlah lokasi sebagai persiapan menjelang penyelenggaraan ASEAN Tourism Forum 2023 yang akan menghadirkan sekitar 310 peserta pameran pariwisata, 150 pembeli, dan 190 delegasi dari ASEAN, Uni Eropa dan Timur Tengah.

Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus karena Tak Efektif dan Anggarannya Besar

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan agar jabatan gubernur dihapus karena dianggap tidak terlalu efektif.

Cak Imin -- panggilan untuk Muhaimin Iskandar -- mengatakan, anggaran untuk gubernur terlalu besar, padahal tugasnya hanya menghubungkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota.

“Pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung, tidak mempercepat,” kata Muhaimin saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1).

Muhaimin mengatakan, pihaknya sedang memantapkan wacana tersebut dengan para ahli. Ia menuturkan, sebelum menghapus jabatan gubernur, PKB lebih dulu mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung diadakan. Wakil Ketua DPR ini berpendapat, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung semestinya cukup pada pemilihan bupati dan wali kota saja.

“Jadi pilkada tidak ada

di gubernur, hanya di kabupaten kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur,” ujar Muhaimin.

Ia mengatakan, banyak hal yang harus dievaluasi dalam sistem politik Indonesia di era Reformasi. Salah satunya adalah politik yang pragmatis dan berlangsung bagaikan kompetisi yang tidak ada habisnya. “Kelihatannya damai tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam, 24 jam, ini sistem yang melelahkan, apalagi di pemilu sangat pragmatis, uang menentukan banyak hal dalam perilaku memilih,” ujarnya.

Ia menyebutkan, situasi itu membuat masa depan kader-kader Nahdlatul Ulama di dunia politik suram karena tidak mempunyai modal yang besar. “Aktivis-aktivis NU (Nahdlatul Ulama) yang selama ini bisa murah sampai bisa duduk di jabatan-jabatan publik dihadapan dengan lapangan yang sangat pragmatis,” kata Cak Imin.

“Jadi kader-kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stres duluan karena sudah modalnya cekak, popularitasnya juga rendah,” katanya. ● mei



FOTO: ANT

ADMIRAL INSPECTION SAMBUT KEDATANGAN PANGKOARMADA III WILAYAH TI Mantan Pangkoarmada III, Laksamana Muda TNI Irvansyah (tengah) memberikan keterangan pers terakhir sebelum serah terima jabatan dengan Pangkoarmada III wilayah timur, Laksamana Muda TNI Agus Hariadi (kiri) di dermaga Armada III, Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Senin (30/1). Panglima Komando Armada III TNI AL wilayah Timur, yang sebelumnya dijabat Laksamana Muda TNI Irvansyah berganti posisi ke Laksamana Muda TNI Agus Hariadi dengan prosesi Admiral Inspection di perairan dermaga Armada III, Katapop, Kab. Sorong, Papua Barat Daya.

PENGUMUMAN

PT. NATIVE MAKMUR INOVASI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Utara selanjutnya disebut “Perseroan” mengumuknkan:

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, dengan ini Perseroan mengumuknkan bahwa telah dilakukan dan disetujui RUPS penyetoran saham kedalam Perseroan sebagai akibat dari kompensasi hak tagih/bentuk tagihan pemegang saham terhadap Perseroan. Demikian pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 31 Januari 2023
Direksi